

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Peningkatan pendapatan riil per kapita dan peningkatan sistem kelembagaan suatu negara dalam jangka waktu tertentu disebut pembangunan ekonomi (Arsyad, 2016). Kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*sustenance*), rasa harga diri yang lebih besar sebagai manusia (*self esteem*), dan kebebasan memilih (*freedom of servitude*) merupakan tiga indikator kunci keberhasilan pembangunan ekonomi. Adanya pembangunan ekonomi diharapkan akan menambah kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan, serta menyejahterakan masyarakat (Todaro & Smith, 2011).

Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya sangat bergantung pada sektor industri pengolahan untuk mendorong kemajuan perekonomian mereka. Negara berkembang memprioritaskan perubahan struktural dalam proses perekonomian, seperti peralihan dari pertanian tradisional ke industri pengolahan, sesuai dengan teori pola pembangunan Chenery (Tambunan, 2012). Mengingat hal ini berdampak pada hajat hidup banyak orang, maka sektor industri pengolahan perlu dipersiapkan secepatnya agar dapat menjadi pemimpin bagi sektor ekonomi lainnya (*leading sector*).

Hasil riset Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia berjumlah 266 juta jiwa pada 2019. Banyaknya jumlah penduduk bagaikan dua sisi

mata uang, dapat menjadi bonus demografi demi mempercepat pembangunan ekonomi sekaligus di sisi lain dapat menjadi boomerang terkait bidang ketenagakerjaan. Hal ini tentu akan berdampak pada besarnya Produk Domestik Bruto (PDB). Data *International Monetary Fund World Economic* menunjukkan Indonesia menempati peringkat 16 sebagai negara dengan PDB terbesar di dunia. Produk Domestik Bruto juga tidak terlepas dari pengaruh kondisi perekonomian di regional yang lebih kecil, seperti tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Barat tercermin dalam angka Domestik Regional Bruto (PDRB).

**Tabel 1. 1 Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah)**

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	93.036	98.096	99.669	101.777	104.596
Pertambangan dan Penggalian	27.440	27.138	26.589	25.496	24.791
Industri Pengolahan	524.315	549.471	578.858	616.441	640.760
Pengadaan Listrik dan Gas	5.799	6.139	5.438	5.438	5.373
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	948	1.009	1.080	1.134	1.168
Konstruksi	98.138	103.507	111.001	119.305	126.612
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	190.349	198.865	207.909	216.613	232.878
Transportasi dan Pergudangan	56.650	61.297	64.258	67.701	71.064
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	29.776	32.559	35.285	38.160	40.928
Informasi dan Komunikasi	41.878	47.856	53.527	58.420	63.861
Jasa Keuangan dan Asuransi	29.521	33.030	34.179	35.727	36.498
Real Estat	13.837	14.738	16.109	17.663	19.344
Jasa Perusahaan	4.932	5.334	5.784	6.284	6.859
Administrasi Pemerintahan, dan Jaminan Sosial Wajib	24.951	25.739	26.933	27.360	28.704
Jasa Pendidikan	32.422	34.885	37.909	40.075	42.156
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.880	9.723	10.537	11.369	12.448
Jasa Lainnya	24.120	26.226	28.790	30.717	32.912
Jumlah	1.206.992	1.275.612	1.343.855	1.419.680	1.490.952

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, data diolah 2024

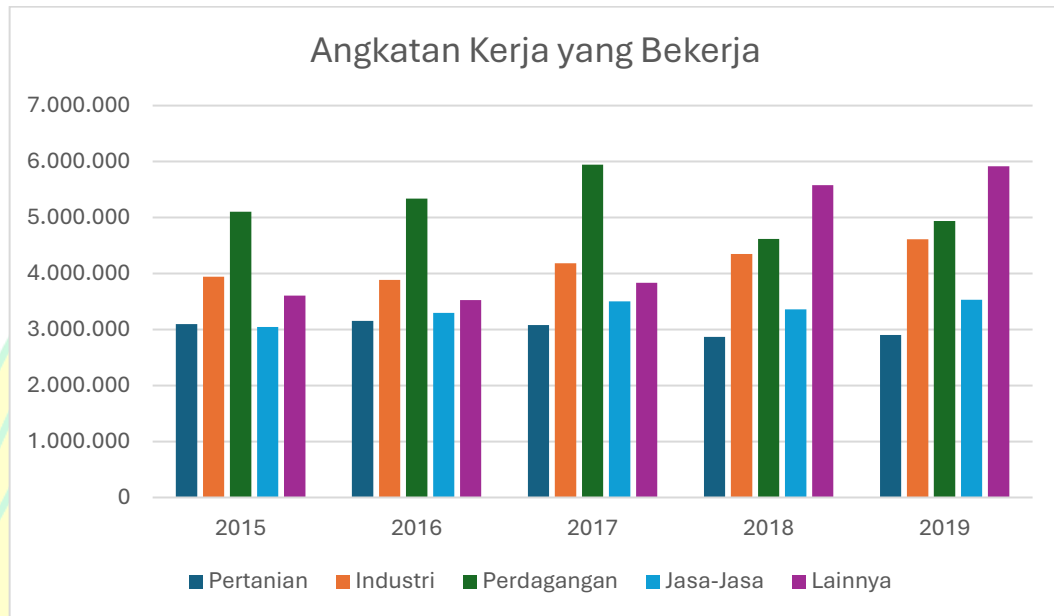
Tabel 1.1 memperlihatkan bahwasanya mulai dari 2015-2019, PDRB Provinsi Jawa Barat selalu meningkat tiap tahun. Sektor industri pengolahan

berperan sebagai pemberi kontribusi paling besar bila dibandingkan sektor lainnya. Akan tetapi tenaga kerja yang terserap di industri pengolahan masih belum optimal.

Jawa Barat memiliki potensi untuk mengembangkan sektor perindustrian karena sumber dayanya yang melimpah. Tak mengherankan jika Jawa Barat menjadi tempat tujuan bagi para pencari kerja dari berbagai daerah. Hal ini menyebabkan peningkatan populasi di Jawa Barat. Jumlah penduduk yang tinggi dapat menunjukkan kebutuhan masyarakat. Apabila penduduk tersebut memiliki kompetensi atau keahlian, maka masyarakat bisa didorong untuk mengelola sumber daya yang tersedia dan nanti hasilnya akan dapat dirasakan oleh masyarakat baik berupa perbaikan infrastruktur, penambahan lapangan kerja, ataupun pembangunan ekonomi lainnya.

Banyaknya jumlah penduduk pasti memiliki dampak baik dan buruk. Oleh karena itu, sumber daya manusia seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan, jika tidak maka pembangunan ekonomi akan terhambat. Kesempatan besar untuk membantu pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Barat melalui pengembangan industri. Namun berdasarkan data, perkembangan sektor industri di Jawa Barat masih belum lebih baik dibandingkan sektor perdagangan. Seperti yang terlihat pada gambar berikut.

**Gambar 1. 1 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019 (Jiwa)**



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, data diolah 2024

Tingginya PDRB sektor industri nyatanya belum mampu menyerap tenaga kerja dengan tinggi juga. Pada gambar 1.1 angkatan kerja yang bekerja pada sektor industri sempat turun tahun 2015 dari 3.945.316 jiwa menjadi 3.884.668 jiwa tahun 2016, kemudian pada tiga tahun berikutnya kembali naik lagi sampai tahun 2019 sebanyak 4.612.383 jiwa. Walaupun mengalami kenaikan, jumlah tersebut masih berada di bawah sektor perdagangan yang bahkan nilai PDRB hampir tiga kali lebih kecil dibandingkan dengan sektor industri pengolahan.

**Tabel 1. 2 Angkatan Kerja dan Angkatan Kerja yang Bekerja pada Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Angkatan Kerja (Jiwa)</b>	<b>Jumlah Angkatan Kerja yang Bekerja (Jiwa)</b>	<b>Tingkat Pengangguran Terbuka (%)</b>
2015	20.586.356	18.791.482	8,72
2016	21.075.899	19.202.038	8,89
2017	22.391.003	20.551.575	8,22
2018	22.628.122	20.779.888	8,23
2019	23.804.456	21.902.958	8,04

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, data diolah 2024

Tabel 1.2 menunjukkan pertumbuhan angkatan kerja cukup stabil pada industri pengolahan di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data di atas jumlah angkatan kerja tahun 2015 sebanyak 20.586.356 orang, tahun 2016 sebanyak 21.075.899 orang, tahun 2017 sebanyak 22.391.003 orang, tahun 2018 sebanyak 22.628.122 orang, dan tahun 2019 sebanyak 23.804.456 orang. Akan tetapi angkatan kerja yang bekerja tahun 2015 hanya 18.791.482 orang, tahun 2016 sebanyak 19.202.038 orang, tahun 2017 sebanyak 20.551.575 orang, tahun 2018 sebanyak 20.779.888 orang, dan tahun 2019 sebanyak 21.902.958 jiwa.

Hal ini menunjukkan bahwasanya banyak tenaga kerja yang belum terserap. Selain itu tingkat pengangguran terbuka Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan tiap tahunnya. Puncaknya terjadi tahun 2016 di mana tingkat pengangguran terbuka Provinsi Jawa Barat sebesar 8,89 persen. Pada tahun 2019 tingkat pengangguran terbuka Provinsi Jawa Barat merupakan tertinggi kedua se-nasional yakni sebesar 8,04 persen, hanya satu peringkat di bawah Provinsi Banten dengan 8,11 persen yang menduduki peringkat pertama.

Sampai sekarang penyerapan tenaga kerja masih menjadi tugas besar di berbagai negara berkembang. Apabila tidak ditangani maka tidak hanya berdampak pada tingginya tingkat pengangguran, tetapi juga memunculkan masalah baru seperti kriminalitas, turunnya daya beli masyarakat, kemiskinan, dan masalah ekonomi lainnya. Ketika angka pengangguran tinggi, produktivitas perekonomian dalam negeri yang ditopang oleh faktor tenaga kerja menjadi berkurang. Hal ini nantinya dapat menghambat pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan dan program pemerintah sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan bidang ketenagakerjaan.

Negara-negara di seluruh dunia mendorong industri manufaktur untuk meningkatkan efisiensi, profitabilitas, dan penghematan daya. Terdapat hubungan erat antara industri dan pembangunan ekonomi. Indonesia tidak ingin ketinggalan dari negara lain yang pembangunan ekonomi dan populasinya terus meningkat. Melalui peningkatan industri dan kesempatan kerja, industrialisasi memainkan peran penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi dan produktivitas masyarakat. Untuk memperbaiki struktur ketimpangan ekonomi dalam jangka panjang, pembangunan industri diperlukan karena memiliki model ekonomi yang berkelanjutan serta keseimbangan antara pertanian dan industri.

Upaya untuk mengembangkan industri pengolahan tentu dipengaruhi oleh faktor lain untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Selain belanja modal, tingkat upah, dan pengeluaran non-upah, produktivitas adalah faktor internal yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Sementara itu, Payaman Simanjuntak mencantumkan suku bunga, tingkat pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan

ekonomi sebagai faktor eksternal (Simanjuntak, 1998). Pengembangan sektor industri padat karya yang menggunakan banyak tenaga kerja dinilai menjadi sebuah investasi sangat penting dalam mendorong pencapaian tujuan pembangunan ekonomi. Selain industri kecil dan mikro, industri besar dan sedang juga mempunyai andil dalam perekonomian nasional serta penyerapan tenaga kerja.

Tidak dapat dipungkiri industri pengolahan yang ada di Jawa Barat berperan besar memberikan sumbangsih terhadap PDRB, berarti industri pengolahan mempunyai permintaan tenaga kerja yang tinggi pula. Namun peningkatan jumlah tenaga kerja tidak diimbangi pertumbuhan unit usaha, khususnya industri besar dan sedang. Hal ini dikarenakan terjadi penurunan jumlah unit usaha terutama di berbagai wilayah terutama Pulau Jawa. Padahal seiring penambahan unit usaha menyebabkan lapangan kerja pun akan bertambah. Lebih banyak lapangan kerja yang tersedia berarti unit usaha dapat mempekerjakan lebih banyak orang sehingga akan menurunkan tingkat pengangguran terbuka.

**Tabel 1. 3 Jumlah Industri Besar dan Sedang di Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa Tahun 2015-2019**

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Jawa</b>	21.460	28.542	27.417	24.489	24.201
<b>Luar Jawa</b>	4.862	6.621	6.160	5.626	5.871
<b>Jumlah</b>	26.322	35.163	33.577	30.115	30.072

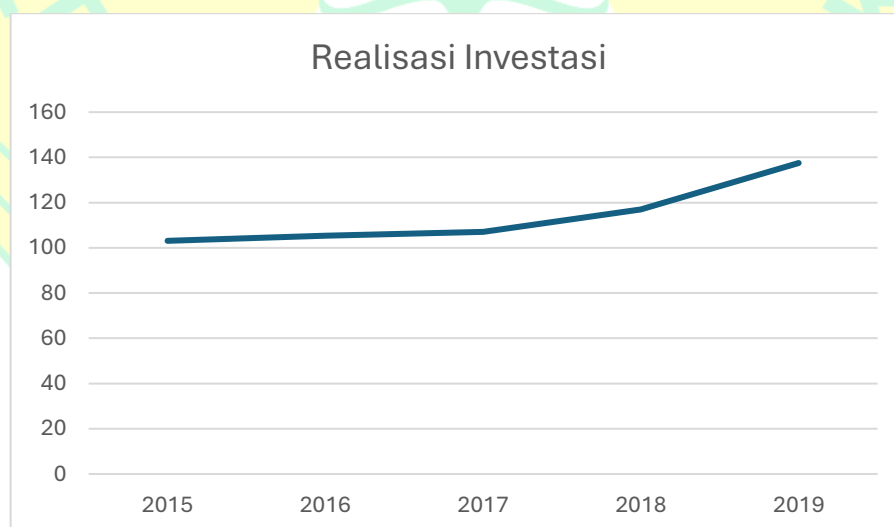
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, data diolah 2024

Tabel 1.3 memperlihatkan bahwasanya sebagian besar unit usaha industri besar dan sedang berada di Pulau Jawa. Berdasarkan data di atas, jumlah industri

besar dan sedang di Pulau Jawa tahun 2015 sejumlah 21.460 unit, tahun 2016 sejumlah 28.542 unit, tahun 2017 sejumlah 27.417 unit, tahun 2018 sejumlah 5.626 unit, dan tahun 2019 sejumlah 24.201 unit. Meskipun terjadi penurunan dalam empat tahun terakhir, jumlah industri besar dan sedang di Pulau Jawa masih jauh melebihi jumlah yang ada di luar Pulau Jawa. Hal ini mengindikasikan belum meratanya sebaran unit usaha dan ketidakseimbangan antara orang yang mencari pekerjaan dengan lapangan kerja yang sudah ada.

Agar sektor industri dapat lebih berkembang dan berjalan sesuai rencana, diperlukan investasi yang cukup. Investasi dapat dilakukan dengan melakukan upaya akumulasi modal. Investasi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan tingkat output, dan dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja melalui mekanisme permintaan agregat. Besarnya penyerapan tenaga kerja juga bergantung pada nilai investasi.

**Gambar 1. 2 Realisasi Investasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019**



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Barat



Gambar 1.2 memperlihatkan realisasi investasi Provinsi Jawa Barat konsisten meningkat tiap tahun. Pada tahun 2019 Jawa Barat menempati peringkat satu nasional sebagai provinsi dengan nilai investasi terbesar yakni 137,5 triliun rupiah. Secara teoritis, penambahan tenaga kerja yang digunakan idealnya meningkat seiring dengan nilai investasi yang dilakukan (Suparmoko, 2004). Berarti terjadi ketidaksesuaian antara keadaan di lapangan dengan teori.

Berdasarkan data dan fakta yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis tertarik untuk meneliti kondisi tersebut dengan mengambil judul penelitian “Pengaruh Jumlah Unit Usaha dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada Industri Besar dan Sedang di Provinsi Jawa Barat”.

## **1.2 Pertanyaan Penelitian**

Berikut merupakan pertanyaan penelitian yang didasarkan pada latar belakang penelitian:

1. Apakah terdapat pengaruh jumlah unit usaha terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri besar dan sedang di Provinsi Jawa Barat?
2. Apakah terdapat pengaruh investasi terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri besar dan sedang di Provinsi Jawa Barat?
3. Apakah terdapat pengaruh jumlah unit usaha dan investasi terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri besar dan sedang di Provinsi Jawa Barat?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah unit usaha terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri besar dan sedang di Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui pengaruh investasi terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri besar dan sedang di Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui pengaruh jumlah unit usaha dan investasi terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri besar dan sedang di Provinsi Jawa Barat.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang diharapkan peneliti adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Akademis

Temuan studi bisa memberikan tambahan wawasan dan menjadi sumber referensi bagi mahasiswa yang memerlukan informasi relevan berhubungan dengan topik ketenagakerjaan.

- b. Peneliti

Memerlukan penyelesaian studi guna mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta serta memperdalam dan memperluas pengetahuan tentang ketenagakerjaan.

2. Manfaat praktis

Berharap penelitian bisa bermanfaat untuk pemerintah dalam menentukan perumusan kebijakan yang tepat sasaran dalam menangani masalah ketenagakerjaan.